



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pakat, 29 September 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum PT.Mnis No.76, Rt.009 Rw.004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perum PT.Mnis No.76, Rt.009 Rw.004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekarang tidak di ketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 283/20/VII/2001, tertanggal 09 Juli 2001,;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai mana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah sendiri hingga pisah;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (baâ€™™dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak: Yoga Alfian bin Muliadi, Lahir 26 Juni 2005; diasuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat egois kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh sudah 2 kali dengan wanita lain terakhir yang bernama yuli;
 - d. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2010 yang mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Perselingkuhan dan judi dan mabuk mabukan dan Tergugat pergi dari rumah sampai saat ini selama 9 tahun lamanya tidak kembali kerumah Penggugat, dan tidak ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah wajib serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah hukum RI;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat tidak ada berusaha mencari Tergugat karena tidak tau dimana keberadaanya;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro xxx kepada Penggugat xxx
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Fatimah alias Fatimah BR. Torus binti Etorus**) Nomor 1402066909790003 tertanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/20/VI/2001 tertanggal 09 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, hingga pisah rumah;;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak pertengahan tahun 2006 yang lalu sudah tidak rukun lagi;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan September 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga kini bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 004, Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Perusahaan di Desa Bandar Padang, Kecamatan Seberida, hingga pisah rumah;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak pertengahan tahun 2006 yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa semenjak bulan September 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga kini bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat dan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat (Jamrizal bin Ramli dan Asep Suherman bin Dodo Zain), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kepergian Tergugat dari rumah sejak bulan September 2010 yang lalu hingga kini, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juli 2001 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan September 2010 yang lalu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa kabar berita hingga kini bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
3. Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sejak bulan September 2010 yang lalu telah pergi dari rumah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقه

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), dan sebelumnya Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp396.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)